

INOVASI *E-GOVERNMENT* MELALUI *SMART KAMPUNG* DI KABUPATEN BANYUWANGI

***Yoga Aldi Saputra¹⁾, Muhammad Rizki Pratama²⁾**

- ¹⁾ Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Gadjah Mada, Indonesia
- ²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
Indonesia

*Email Korespondensi : yogaaldisaputr@gmail.com

Diterima Redaksi: 20-08-2022 | Selesai Revisi: 21-01-2023 | Diterbitkan online: 11-04-2023

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan inovasi *e-government* yang dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi. Inovasi *e-government* melalui *Smart Kampung* dari Kabupaten Banyuwangi muncul dari komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan pemberdayaan masyarakat kepada warganya. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dalam kerangka pendekatan kualitatif. Hasil deskripsi studi ini menunjukkan progres positif inovasi *e-government* pemerintah daerah menuju *good governance*. Selain itu adanya program ini bertujuan untuk membantu mempercepat dan memudahkan layanan kepada masyarakat baik itu layanan yang diakses secara *online* maupun *offline*. Program ini memiliki 7 prioritas inovasi dan ditargetkan dapat diterapkan pada 189 desa dan 28 kelurahan di Kabupaten Banyuwangi.

Kata Kunci: *Smart Kampung; E-Government; Good Governance*

Abstract

This study aims to describe e-government innovations carried out by Banyuwangi Regency. The e-government innovation through Smart Kampung from Banyuwangi Regency arises from the local government's commitment to provide the best service and community empowerment to its citizens. This study uses a literature review method within the framework of a qualitative approach. The results of the description of this study show the positive progress of local government e-government innovation towards good governance. In addition, the existence of this program aims to help speed up and facilitate services to the public, both services that are accessed online and offline. This program has 7 innovation priorities and is targeted to be implemented in 189 villages and 28 sub-districts in Banyuwangi Regency.

Keywords: *Smart Kampung; E-Government; Good Governance*

PENDAHULUAN

Pengembangan *electronic government (e-government)* untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan suatu strategi dan sistematika perencanaan yang tepat. Kebijakan berupa strategi nasional dalam mengembangkan *e-government* diatur di dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 (Sugiharti et al., 2021). Selama ini konsep *e-government* diterapkan secara berbeda di setiap negara, akan tetapi mayoritas memilih untuk menerapkan konsep *smart city* di level kota (Wargadinata, 2021). Perkembangan *smart city* saat ini telah menjadi suatu *trend* bagi perkembangan suatu kota untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selain itu menurut Aziiza & Susanto (2020) konsep *smart city* juga berfokus pada pengembangan masyarakat melalui infrastruktur dan fasilitas TIK. Kecepatan perkembangan teknologi informasi merupakan sebuah solusi yang tidak hanya dirasakan oleh sektor privat akan tetapi juga sektor publik untuk meningkatkan kinerja operasionalnya. Adanya teknologi dapat membawa suatu perubahan transformasional dalam penyampaian suatu layanan publik, kegiatan administrasi, maupun keterlibatan masyarakat umum. Hal ini tentunya menjadi peluang bagi suatu pemerintah daerah untuk mengubah cara layanan yang ditawarkan kepada warganya dengan menerapkan model pengelolaan dan layanan yang lebih efisien, serta inovatif (Saleh et al., 2022).

Bentuk dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu dengan terbitnya suatu *Masterplan Smart City* melalui suatu gerakan 100 *Smart City* di Indonesia (Aziz & Putri, 2021). Salah satu kegiatannya adalah melakukan pendampingan bagi kabupaten atau kota untuk memaksimalkan penggunaan TIK baik di dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat ataupun melakukan akselerasi terhadap potensi yang ada di masing-masing daerah. Keberhasilan *smart city* dalam mengatasi permasalahan yang kompleks di perkotaan, menjadikan konsep ini diadopsi dan dikembangkan di perdesaan dengan nama *smart village*. Menurut Chatterjee & Kar (2011) dalam Baru et al (2019) *smart village* merupakan suatu desa yang mana pemerintah desa menyediakan sekumpulan layanan bagi warganya yang ramah terhadap semua usaha/ bisnis yang dilakukan, bertindak sebagai penyedia, serta

menghadirkan layanan yang diperlukan oleh masyarakat desa secara lebih efektif dan efisien dengan adanya bantuan dari TIK. Pada konsep *smart village*, suatu desa memanfaatkan TIK untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep *smart village* telah mendapatkan banyak perhatian di Indonesia, dengan berbagai proyek yang didirikan di hampir setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia (Saleh et al., 2022). Hal ini karena dorongan dari warga yang menuntut adanya efisiensi yang lebih besar, dan terciptanya pembangunan berkelanjutan. Selain itu adanya *smart village* didasarkan pada kebutuhan akan *smart city* di perkotaan dan perdesaan yang memiliki standar yang berbeda. Sehingga tidak semua elemen yang terdapat di *smart city* dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

Konsep *smart village* merupakan suatu konsep yang dikembangkan oleh N. Viswanadham, dan Sowmya Vedula dari India dalam bukunya yang berjudul “*Design of Smart Village*”(Aziiza & Susanto, 2020). Model *smart village* mengikuti model dari *smart city* sebagai dampak dari perubahan teknologi yang terintegrasi untuk diimplementasikan di daerah terpencil. Konsep *smart village* menggambarkan sebuah ekosistem suatu desa, serta memberikan gambaran suatu prosedur mengenai bagaimana membangun desa pintar (Aziiza & Susanto, 2020). Kemudian *European Network for Rural Development* dalam Subekti & Damayanti (2019) mendefinisikan bahwa *smart village* adalah kawasan perdesaan yang membangun kekuatan pada aset yang mereka miliki dengan mengembangkan nilai tambah (*added value*) melalui teknologi informasi komunikasi, inovasi, serta penggunaan pengetahuan yang lebih baik untuk masyarakat. Berikut beberapa karakteristik dari *smart village* menurut Sugiharti et al. (2021).

Tabel 1 Karakteristik *Smart Village*

Aspek	<i>Smart Village</i>
Pendekatan	<i>Bottom Up</i>
Posisi Pemerintah	Fasilitator
Posisi Warga	Pelanggan (<i>Customer</i>)
Pembangunan	Kesadaran dan partisipasi
Prioritas Target	Masyarakat kelas menengah ke bawah
Kondisi Sukses	Pendekatan sosial budaya menjadi dasar untuk dukungan <i>smart village</i>

Tujuan	Memanfaatkan TIK untuk pemberdayaan, Penguatan kelembagaan, dan kesejahteraan sosial
--------	---

Sumber: Sugiharti et al. (2021)

Salah satu penerapan *smart village* adalah hadirnya *Smart Kampung* yang merupakan suatu program inovasi *e-government* dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. *Smart Kampung* membantu untuk mempercepat dan memudahkan layanan kepada masyarakat baik itu layanan yang diakses secara *online* maupun *offline* (Aziiza & Susanto, 2020). Program ini merupakan hasil inisiatif dari bupati Kabupaten Banyuwangi yaitu Abdullah Azwar Anas. Adanya program ini dilandasi karena kondisi geografis Kabupaten Banyuwangi yang sebagian besar adalah perdesaan, serta jarak antara satu desa dengan desa lain maupun antara kecamatan dengan kecamatan lain yang berjauhan. Bahkan ada kawasan yang memerlukan perjalanan darat hingga 3 jam untuk mendapatkan akses layanan di Kabupaten Banyuwangi (Manar et al., 2021). Hal ini tentunya berdampak pada sulitnya masyarakat untuk bisa mengakses layanan publik. Dengan kondisi tersebut, akhirnya pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan berbasis teknologi yang bersifat terpusat (Lintang Pamungkas, 2020). Tujuannya adalah menciptakan suatu layanan pemerintah yang ringkas, cepat, dan definitif.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan pemberdayaan masyarakat kepada warganya. Hal ini tentunya merupakan upaya pemerintah menuju tata kelola pemerintah yang baik atau *good governance* yang ditandai dengan pelayanan publik berdasarkan dengan persamaan hak, dan semua warga mendapatkan perlakuan yang sama (Ella Lesmanawaty, 2021). Penelitian ini mendeskripsikan inovasi *e-government* yang dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi. Deskripsi ini penting sebab Kabupaten Banyuwangi telah mengembangkan konsep *smart village* sejak tahun 2015, kemudian dilakukan *branding* ulang dengan nama *Smart Kampung* (Baru et al., 2019). Pada tahun 2021 daftar domain desa di Kabupaten Banyuwangi yang telah menerapkan *smart Kampung* yaitu sejumlah 189 desa (Kababwi, 2021). Beberapa diantaranya seperti Desa Jajag, Desa Purwoasri, Desa Banyuanyar, dan lain sebagainya. Inovasi tersebut telah diinisiasi dengan waktu yang tidak singkat dan dengan cakupan wilayah yang besar sehingga diperlukan deskripsi

tebal mengenai sejauh mana implementasi inovasi yang pada dasarnya memiliki kadar kesulitan dan kegagalan yang tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literatur review dalam kerangka pendekatan kualitatif. Metode literatur review merupakan upaya untuk menelaah masalah tertentu dengan menggunakan bahan data sekunder (Lubis et al., 2020). Data yang digunakan oleh peneliti yaitu data yang berkaitan dengan objek kajian dengan sudut pandang relevansi permasalahan *smart village*. Tahapan analisis dalam penelitian ini diantaranya adalah membaca jurnal/ data ilmiah yang berkaitan dengan konsep *smart village*, implementasi *Smart Kampung* di Kabupaten Banyuwangi, serta perkembangan *e-government* yang telah dipublikasikan baik secara nasional maupun internasional dalam kurun tahun 2016-2021 dengan mempertimbangkan relevansi masalah. Selanjutnya penulis mencatat hasil interpretasi dari proses membaca, dan menyusun ke dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) *E-Government* melalui *Smart Village*

Organisasi publik sering mendapatkan kritik karena terkesan kaku, prosedural, tidak efisien, serta tidak mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjawab kritik yang ada pemerintah mulai mengeluarkan terobosan dalam bentuk inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat (Ella Lesmanawaty, 2021). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang tepat serta efisien (Saleh et al., 2022). Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang secara masif pada akhirnya mengubah wajah organisasi pemerintah ke dalam konsep digital melalui *e-government*. Konsep *e-government* membuka akses bagi masyarakat seluas-luasnya untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah melalui berbagai *platform* digital.

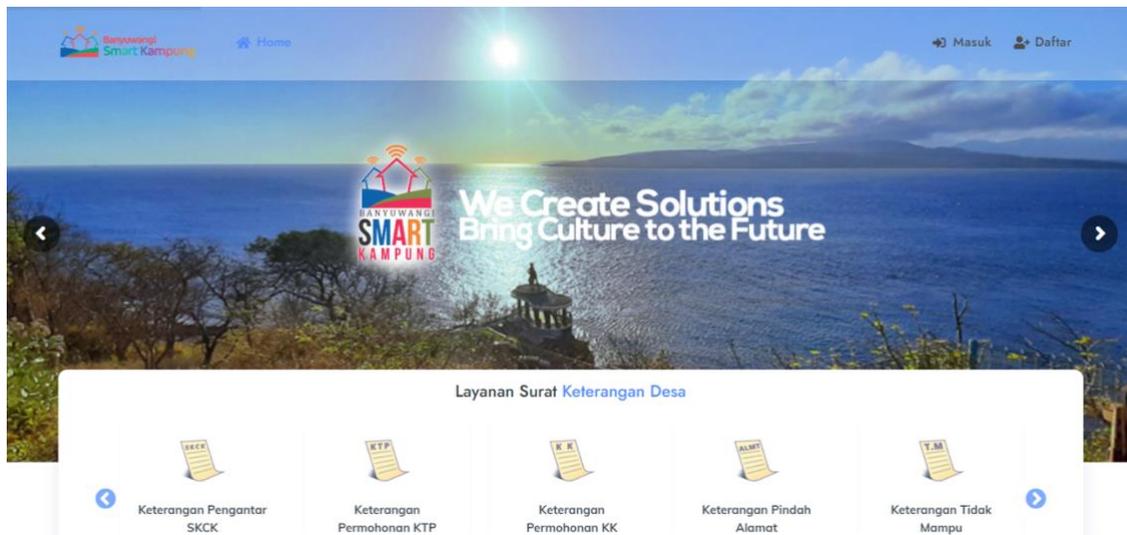
E-government memberikan hak yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan publik. Salah satu bentuk penerapan *e-government* yaitu adanya konsep *smart*

village yang merupakan layanan yang dapat memberikan informasi mengenai semua persyaratan dan prosedur yang dibutuhkan oleh masyarakat desa tanpa terkecuali. Istilah *smart village* apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka memiliki makna desa pintar. Hal ini untuk melawan suatu stigma yang telah melekat pada desa, seperti anggapan bahwa desa terbelakang secara pendidikan, miskin, serta tidak mengikuti perkembangan *trend* (Subekti & Damayanti, 2019).

b) Penerapan *Smart Kampung* di Kabupaten Banyuwangi

Program *Smart Kampung* merupakan suatu inovasi *e-government* dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang diharapkan dapat menjadi solusi dengan situasi Banyuwangi yang 87% wilayahnya adalah perdesaan (Manar et al., 2021). Program *Smart Kampung* diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Masterplan *Smart City* melalui Banyuwangi *Smart Kampung* (Ardiyasa & Rahayu, 2022). *Smart Kampung* merupakan suatu pengembangan masyarakat pada suatu komunitas dengan cara yang pintar dan bijak dalam memecahkan suatu permasalahan dengan cara mengoptimalkan semua sumber daya secara efisien, serta memperhatikan norma dan adat yang berlaku di dalamnya. Sejak tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai mengadopsi konsep *Smart Kampung* sebagai salah satu kebijakan strategis (Baru et al., 2019). Melalui kebijakan ini, Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah 5.782,50 km² yang mana merupakan kabupaten terluas di Pulau Jawa memiliki visi bahwa pelayanan publik harus menjangkau hingga pinggiran secara merata.

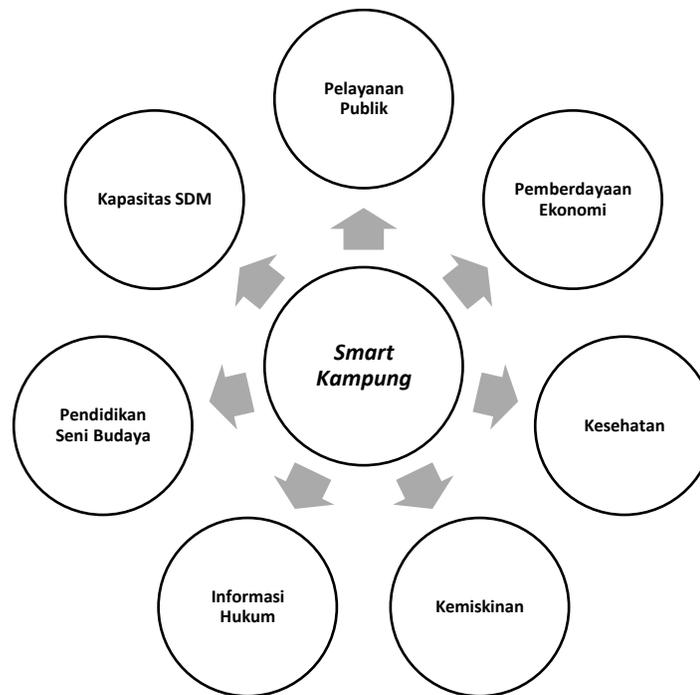
Sejak diterapkan *Smart Kampung* sebagai inovasi *e-government* di Kabupaten Banyuwangi, pada tahun 2017 pemerintah daerah mendapatkan penghargaan TOP IT dan Telco dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penerapan program *Smart Kampung* dalam upaya pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet pada setiap desa bekerja sama dengan PT. Telkom Indonesia (Gartika et al., 2019). Adopsi teknologi informasi dilakukan melalui penataan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.



Gambar 1 Portal Layanan Smart Kampung

Sumber: <https://smartKampung.id> (2022)

Terdapat perbedaan jenis dan jumlah layanan *Smart Kampung* pada masing-masing desa di Banyuwangi. Sebagai contoh di Desa Ketapang memiliki 35 pelayanan, dengan rata-rata setiap layanan hanya 5 menit (Aziiza & Susanto, 2020). Setiap desa memiliki otonominya masing-masing sehingga pemerintah kabupaten hanya memberikan fasilitas berupa infrastruktur dan arahan untuk peningkatan TIK. Bagi desa yang tidak memiliki staf TI (Teknologi Informasi) maka dapat melakukan rekrutmen staf TI. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada standar yang digunakan oleh semua desa dalam melakukan pelayanan yang mana pelayanan disesuaikan dengan kreativitas, kemampuan, dan kebutuhan desa. Terdapat 7 prioritas program inovasi pelayanan pemerintah desa di dalam konsep *Smart Kampung* diantaranya adalah: pelayanan publik, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, informasi hukum, pengentasan kemiskinan, seni budaya, pendidikan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Sanjaya et al., 2018). Berikut merupakan penjelasan setiap program pada *Smart Kampung*.



Gambar 2 Prioritas Program *Smart Kampung*
Sumber: Olahan Penulis (2022)

1. Pelayanan Publik (*Smart Governance*)

Program ini menjadi fokus dalam pengembangan *Smart Kampung* untuk mendekatkan masyarakat dengan layanan publik yang selama ini terhambat akibat adanya jarak yang berjauhan antar desa ke kota sebagai pusat pelayanan pemerintah. Selain itu melalui *Smart Kampung* masyarakat tidak perlu untuk meluangkan waktu yang terlalu lama karena prosedur layanan yang berbelit-belit (Lintang Pamungkas, 2020). *Smart Kampung* Kabupaten Banyuwangi juga telah terintegrasi dengan dengan program pemerintah desa (Setiawan P et al., 2016).

Berbagai program layanan publik ini yang terdapat pada *smart Kampung* diantaranya adalah: Pertama, **Sistem Informasi Manajemen Desa (SimDes)** yaitu suatu portal yang berguna untuk mengelola data kependudukan desa. Aplikasi ini terhubung dengan sistem data base masyarakat di tingkat kabupaten yaitu SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), yang berguna untuk mengurus keperluan surat administrasi seperti surat keterangan pindah, surat pernyataan keterangan miskin, dan lain sebagainya. Estimasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap layanan sangat cepat berkisar hanya 3-5

menit (Ana Fitrianti et al., 2021). Hal ini tentunya menciptakan layanan publik yang lebih berkualitas, efisien, serta efektif. Kedua, **Portal Banyuwangi** yaitu suatu portal layanan publik guna mengurus surat keterangan. Portal ini digunakan untuk mengurus berbagai jenis surat keterangan. Sebagai contohnya surat keterangan umum, pindah, kelahiran, dan lain sebagainya. Ketiga, **Procot Lahir Bawa Akta** yaitu sebuah sistem untuk mengurus akta kelahiran, serta kartu keluarga baru dengan metode *online*. Sebelum adanya program *Smart Kampung* untuk mengurus akta kelahiran maka masyarakat harus pergi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tentunya memakan waktu, saat ini dengan Procot Lahir Bawa Akta bagi bayi yang baru berusia 1-3 hari sudah dapat didaftarkan untuk pembuatan akta. Hal ini tentunya memudahkan masyarakat, serta membuat layanan publik lebih efisien.

Keempat, *e-village budgeting (e-vb)* yaitu sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran keuangan desa pertama di Indonesia. Melalui sistem ini masyarakat dapat melakukan pengawalan terhadap penggunaan dana desa dengan penggunaan yang lebih transparan, serta tepat pada sasaran. Selain itu melalui *e-village budgeting* juga ikut mencegah adanya program pemerintah yang tumpang tindih. Partisipasi masyarakat dengan adanya *e-village budgeting* juga ikut terbangun, mereka dapat ikut melakukan perencanaan dan memastikan program apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah desa dari anggaran APBDes. Kelima, *e-village monitoring system (e-vms)* yaitu sistem untuk melakukan pengawalan suatu kegiatan (*monitoring*) dan evaluasi terhadap keuangan desa yang berbasis *online*. Sistem ini digunakan untuk *controlling* proses pembangunan fisik yang terjadi di desa. *E-village monitoring system* dalam prosesnya telah terhubung dengan *e-village budgeting (e-vb)*. Seluruh program untuk pembangunan fisik akan dipantau melalui penggunaan teknologi berbasis fitur *google maps* berbayar.

Tabel 2 Program Pelayanan Publik

No	Nama Program	Manfaat Program
1	Sistem Informasi Manajemen Desa	Mengelola data kependudukan desa
2	Portal Banyuwangi	Portal layanan publik guna mengurus surat keterangan
3	Procot Lahir Bawa Akta	Mengurus akta kelahiran, serta kartu keluarga baru

4	<i>E-Village Budgeting</i>	Sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran keuangan desa
5	<i>E-Village Monitoring System</i>	Melakukan pengawalan suatu kegiatan (<i>monitoring</i>) dan evaluasi terhadap keuangan desa

Sumber: Olahan Penulis (2022)

2. Pemberdayaan Ekonomi (*Smart Economy*)

Program ini diwujudkan melalui pengembangan BUMDes sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa. Diperlukan suatu manajemen yang baik untuk mengelola potensi yang ada di desa. Instrumen TIK dalam *smart* Kampung mampu mendorong kreativitas dari masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif (Astuti, 2017). Produk yang dihasilkan oleh masyarakat lokal nantinya akan dipromosikan melalui banyuwangi-mall.com. Beberapa usaha masyarakat yang dikelola oleh BUMDes antara lain: Pertama, **Pasar Desa** merupakan sebuah pasar yang telah diperbaiki secara tata kelola manajemen menjadi lebih modern, seperti dilakukan penataan parkir, pengelolaan terhadap sampah, pengelolaan toilet, serta pengelolaan terhadap retribusi bagi pedagang. Kedua, **Toserba**, yang mana harga barang yang dijual di Toserba lebih murah dikarenakan adanya kerja sama antara pemerintah desa dengan distributor. Ketiga, **Kantin Desa**, merupakan suatu unit usaha masyarakat yang menyediakan makanan dan minuman dilengkapi dengan fasilitas *wifi* bagi warga yang sedang berkunjung ke kantor desa.

Selanjutnya keempat, **Jasa Pelayanan Sampah**, merupakan suatu jasa untuk pengangkutan sampah di desa yang berasal dari rumah makan. Nantinya sampah plastik akan dilakukan proses pengolahan. Program jasa pelayanan sampah nantinya akan diintegrasikan dengan program *eco literasi* yang merupakan program pembelajaran untuk anak agar mereka mau mencintai dan melestarikan lingkungan. Kelima, **Unit Simpan Pinjam**, merupakan sebuah unit yang digunakan untuk simpan pinjam masyarakat desa. Adanya program ini membantu masyarakat desa untuk meminjam uang tanpa ada jaminan. Selain itu bunga yang ditawarkan melalui program ini juga rendah, sehingga tidak memberatkan masyarakat. Sebelumnya masyarakat desa harus meminjam uang ke bank dengan perhitungan bunga yang lumayan besar sehingga memberatkan bagi warga desa. Keenam, **Pengembangan e-commerce**, bertujuan sebagai wadah untuk penjualan aneka produk hasil industri rumah tangga, maupun UMKM secara *online*. Pemerintah

desa bekerja sama dengan PT. Icon Plus. Akan tetapi program ini belum terlalu berjalan, karena adanya kendala di sumber daya manusia, proses transaksi belum besar, dan belum banyaknya produk yang dapat ditawarkan.

Tabel 3 Program Pemberdayaan Ekonomi

No	Nama Program	Manfaat Program
1	Pasar Desa	Pasar dengan tata kelola manajemen yang lebih modern.
2	Toserba	Kerja sama antara pemerintah desa dengan distributor yang menjual barang dengan harga lebih murah.
3	Kantin Desa	Unit usaha masyarakat yang menyediakan makanan dan minuman.
4	Jasa Pelayanan Sampah	Pengangkutan sampah di desa yang berasal dari rumah makan.
5	Unit Simpan Pinjam	Unit untuk simpan pinjam masyarakat desa.
6	<i>E-Commerce</i>	Wadah untuk penjualan aneka produk hasil industri rumah tangga.

Sumber: Olahan Penulis (2022)

3. Pelayanan Kesehatan (*Smart Living*)

Program ini berfokus pada upaya pemerintah desa dalam memberikan pelayanan berupa pengobatan tanpa membayar bagi masyarakat miskin yang sakit. Beberapa program *Smart Kampung* yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan diantaranya adalah: Pertama, **Gandrung JKN**, merupakan sebuah program kolaborasi antara *Smart Kampung* dengan BPJS. Melalui program ini masyarakat yang ingin mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS cukup berkunjung ke kantor desa. Masyarakat tinggal membawa semua persyaratan untuk pendaftaran BPJS dan nantinya akan diproses petugas kantor desa. Kemudian untuk kartu BPJS nantinya akan dikirimkan melalui PT. POS Indonesia. Gandrung JKN merupakan inovasi pertama yang mengintegrasikan layanan BPJS hingga ke tingkat desa.

Kedua, **Surat Pernyataan Miskin (SPM)** merupakan suatu sistem pelayanan publik di bidang kesehatan bagi keluarga tidak mampu/miskin yang selama ini tidak mendapatkan fasilitas layanan BPJS. Dengan adanya sistem ini, setiap keluarga miskin dapat mengurus SPM untuk pengobatan di rumah sakit rujukan baik pemerintah ataupun swasta. Warga yang ingin mengurus SPM sebelum adanya *Smart Kampung* harus mengeluarkan biaya, waktu, dan juga tenaga. Sehingga hadirnya inovasi ini membuat layanan publik menjadi lebih mudah.

Tabel 4 Program Pelayanan Kesehatan

No	Nama Program	Manfaat Program
1	Gandrung JKN	Kolaborasi antara <i>Smart</i> Kampung dengan BPJS untuk mempermudah pendaftaran peserta BPJS.
2	Surat Pernyataan Miskin	Sistem pelayanan publik bagi masyarakat yang tidak mendapatkan fasilitas layanan BPJS.

Sumber: Olahan Penulis (2022)

4. Pengentasan Kemiskinan (*Smart Living*)

Program pengentasan kemiskinan merupakan isu prioritas, karena adanya tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Kabupaten Banyuwangi. Beberapa program *Smart* Kampung yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan diantaranya adalah: Pertama, **Rentang Kasih** yaitu program pemberian makanan bagi masyarakat tidak mampu/miskin yang sudah tidak dapat bekerja secara mandiri. Pemerintah desa memberikan jatah memberikan makanan 2 kali dalam satu hari. Kedua, **Renovasi Rumah dan Jamban** yaitu program peningkatan kualitas hidup warga. Ketiga, **Unit Gawat Darurat Kemiskinan (UGDK)** yaitu sistem untuk mendata masyarakat tidak mampu/miskin yang ada di suatu desa. Dengan adanya sistem ini, pemerintah desa dapat melakukan pengecekan ulang bagi masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan sosial. Sehingga tercipta suatu *data base* bagi keluarga miskin penerima bantuan yang tepat. Selain itu sistem ini sudah terintegrasi dengan semua program pengentasan kemiskinan.

Tabel 5 Program Pengentasan Kemiskinan

No	Nama Program	Manfaat Program
1	Program Rentang Kasih	Program pemberian makanan bagi masyarakat tidak mampu/miskin.
2	Renovasi Rumah dan Jamban	Program peningkatan kualitas hidup warga.
3	Unit Gawat Darurat Kemiskinan (UGDK)	Mendata masyarakat tidak mampu/miskin yang ada di suatu desa.

Sumber: Olahan Penulis (2022)

5. Informasi Hukum (*Smart Governance*)

Pilar yang menyediakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) berbasis *online* yang bertujuan agar masyarakat memahami dan mengetahui akan prosedur-prosedur hukum yang berlaku.



Gambar 3 Program Informasi Hukum

Sumber: Olahan Penulis (2022)

6. Pendidikan dan Seni Budaya (*Smart Society*)

Pilar dalam *Smart* Kampung yang dilaksanakan melalui pengembangan rumah baca/ perpustakaan, serta pelatihan pentas seni yang rutin dilaksanakan di desa. Pertama, program **Desa Literasi** yang merupakan sebuah gerakan untuk mengembangkan dan menumbuhkan minat baca bagi masyarakat desa, sehingga terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa (Sekarsari & Winarno, 2018). Kedua, program **Perpustakaan Desa** menyediakan buku-buku bagi para pelajar maupun bacaan umum bagi orang tua. Program ini terkoneksi dengan program desa literasi. Ketiga, **Pelatihan dan Pertunjukan Seni Budaya** merupakan program untuk mendukung pelestarian seni dan budaya di masyarakat agar tidak hilang. Kegiatan ini juga diintegrasikan dengan kegiatan di sektor pariwisata.

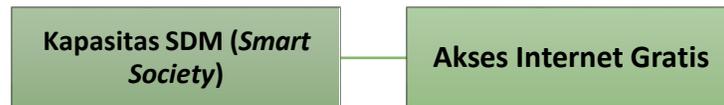
Tabel 6 Program Pendidikan dan Seni Budaya

No	Nama Program	Manfaat Program
1	Program Desa Literasi	Gerakan untuk mengembangkan dan menumbuhkan minat baca masyarakat
2	Perpustakaan Desa	Menyediakan buku-buku bagi para pelajar maupun bacaan umum
3	Pelatihan dan Pertunjukan Seni Budaya	Mendukung pelestarian seni dan budaya di masyarakat

Sumber: Olahan Penulis (2022)

7. Kapasitas SDM (*Smart Society*)

Program pengembangan kapasitas bagi sumber daya manusia diwujudkan melalui pemberian beasiswa bagi pelajar dan juga mahasiswa. Pada program *Smart Kampung* terdapat **program akses internet gratis** guna mendukung berbagai kegiatan yang ada di masyarakat. Selain itu masyarakat akan lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Hal ini juga mempermudah pemerintah desa dalam menyebarkan suatu informasi ataupun kegiatan bagi pembangunan desa melalui sistem *online*.



Gambar 4 Program Kapasitas SDM

Sumber: Olahan Penulis (2022)

c) *Smart Kampung* menuju *Good Governance*

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan pemberdayaan masyarakat kepada warganya. Hal ini tentunya merupakan upaya pemerintah menuju tata kelola pemerintah yang baik atau *good governance* yang ditandai dengan pelayanan publik yang didasari dengan persamaan hak, dan semua warga mendapatkan perlakuan yang sama. Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) “*Governance and Sustainable Human Development, 1997*”) dalam Graham et al., (2003) terdapat 9 prinsip dari *Good Governance* diantaranya adalah: Partisipasi Masyarakat; Tegaknya Supremasi Hukum; Transparansi; Ketanggaan; Berorientasi pada Konsensus; Kesetaraan; Akuntabilitas; Efektivitas dan Efisiensi; serta Visi Strategis. Dari 9 prinsip *good governance* menurut UNDP, terdapat 7 prinsip yang telah terpenuhi dengan hadirnya *Smart Kampung* diantaranya adalah:

Pertama, Partisipasi Masyarakat. Prinsip partisipasi bagi masyarakat dalam program *Smart Kampung* muncul dengan adanya program pemberdayaan masyarakat (Aji & Dharmawan, 2020), berupa program pengembangan *e-commerce*, serta pasar desa yang merupakan sebuah pasar yang telah diperbaiki secara tata kelola manajemen menjadi lebih *modern*. Kedua, Transparansi. Prinsip transparansi dapat terwujud melalui *e-village*

budgeting (e-vb) yang berguna untuk merencanakan dan mengelola anggaran keuangan desa. Melalui sistem ini masyarakat dapat mengawal penggunaan dana desa, sehingga penggunaannya dapat lebih transparan serta tepat sasaran. Ketiga, Ketanggapan. Prinsip ketanggapan dalam *Smart Kampung* salah satunya diwujudkan dalam program Gandrung JKN, merupakan sebuah program kolaborasi antara *Smart Kampung* dengan BPJS. Melalui program ini masyarakat yang ingin mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS dimudahkan dengan cukup datang ke kantor desa.

Keempat, Kesetaraan. Prinsip kesetaraan dalam program *Smart Kampung* difokuskan pada masyarakat miskin agar mendapatkan kesejahteraan yang sama. Salah satu layanan yang ada adalah adanya sistem Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mendapatkan layanan BPJS. Kelima, Efektivitas dan Efisiensi. Prinsip efektivitas dan efisiensi merupakan salah satu tujuan pokok hadirnya program *Smart Kampung* yang mana dapat tercipta layanan publik yang tidak berbelit-belit secara prosedural. Salah satu layanan yang ada adalah adanya Sistem Informasi Manajemen Desa (SimDes) untuk mengurus keperluan surat administrasi seperti surat pernyataan keterangan miskin, pindah, dan lain sebagainya. Keenam, Akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas dalam program *Smart Kampung* dapat terwujud dengan adanya *e-village monitoring system (e-vms)*. Seluruh program pembangunan fisik akan dipantau melalui penggunaan teknologi berbasis fitur *google maps* berbayar. Masyarakat dapat mengawal suatu kegiatan, serta melakukan evaluasi terhadap keuangan desa. Selain itu sistem ini juga digunakan untuk *controlling* proses pembangunan fisik di desa. Ketujuh, Visi Strategis. Tujuan pembangunan manusia (SDM) melalui prinsip visi strategis dalam program *Smart Kampung* diwujudkan dengan adanya program Desa Literasi yang merupakan sebuah gerakan untuk mengembangkan dan menumbuhkan minat baca bagi masyarakat desa. Selain itu ada juga Pelatihan dan Pertunjukan Seni Budaya merupakan program untuk mendukung pelestarian seni dan budaya di masyarakat agar tidak hilang. Kegiatan ini juga diintegrasikan dengan kegiatan di sektor pariwisata.

KESIMPULAN

Program *Smart Kampung* sebagai salah satu bentuk dari *smart village* yang diterapkan oleh Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu *best practice* dalam penerapan tata kelola yang baik atau *good governance* karena berupaya untuk mewujudkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, ketanggapan, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan, serta visi strategis. Tujuan dari program ini yaitu membantu dalam mempercepat dan memudahkan layanan kepada masyarakat baik itu layanan yang diakses secara *online* maupun *offline*. Program ini berbasis teknologi yang bersifat terpusat, hal ini dilandasi karena kondisi geografis Kabupaten Banyuwangi yang merupakan perdesaan, dan juga jarak antar desa maupun antar kecamatan yang berjauhan. Setiap desa memiliki jumlah dan jenis layanan yang berbeda-beda yang mana disesuaikan dengan kebutuhannya.

REFERENSI

- Aji, G. G., & Dharmawan, A. (2020). *E-Government to Improve Public Service in Village Difussion of Smart Kampung Innovation in Banyuwang*. 226(Icss), 347–351. <https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.71>
- Ana Fitrianti, A., Cellindita, S., & Pramnesti, K. (2021). Efektivitas Inovasi Program Smart Kampung Di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi. *Journal of Governance Innovation*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i1.438>
- Ardiyasa, G. G., & Rahayu, E. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART KAMPUNG DI KABUPATEN BANYUWANGI. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 712–728.
- Astuti, D. D. (2017). Reformasi Dan Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Desa Dengan Metode “ Smart Kampung” Kabupaten Banyuwangi. *Prosiding Tantangan Bisnis Era Digital*, 1(1), 67–83.
- Aziiza, A. A., & Susanto, T. D. (2020). The Smart Village Model for Rural Area (Case Study: Banyuwangi Regency). *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 722(1), 12011.
- Aziz, N. A., & Putri, N. P. (2021). Smart Kampung, Mereduksi Birokratisasi Pelayanan Publik (Studi pada Desa Wringinrejo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) FIA UB*, 7(3), 414–422.
- Baru, V. P., Djunaedi, A., & Herwangi, Y. (2019). Tahap Pengembangan Smart Kampung di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Planoearth*, 4(2), 68. <https://doi.org/10.31764/jpe.v4i2.1000>

- Ella Lesmanawaty, W. (2021). The Leadership Role in The Smart-Village Program in Banyuwangi District, East Java. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 13(1), 79–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jtp.v13i1.1429>
- Gartika, D., Rusli, B., Rochaeeni, A., & Satia Muharam, R. (2019). Policy Network: Smart Village Program in Banyuwangi Regency. *Iapa Proceedings Conference*, 2, 690. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2019.261>
- Graham, J., Amos, B., & Plumptre, T. (2003). Principles for Good Governance in the 21st Century - Policy Brief No. 15. *Policy Brief No.15*, 15, 1–8.
- KabarBwi. (2021). *Smart Kampung Banyuwangi Kembali Diganjar Penghargaan Pemerintah Pusat* (p. 1).
- Lintang Pamungkas, N. (2020). Penyerahan Agenda Politik Pemerintah: Pengelolaan Kebijakan Smart Kampung Berbasis Society Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Transformative*, 6(1), 48–71. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.01.3>
- Lubis, H., Rohmatillah, N., & Rahmatina, D. (2020). Strategy of Tourism Village Development Based on Local Wisdom. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 320. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i2.22385>
- Manar, D., Alfirdaus, L., & Yuwono, T. (2021). *Localizing IT: Smart Kampung as Banyuwangi Regency's Innovation from Below 2015-2020*. 2–5. <https://doi.org/10.4108/eai.9-10-2020.2304816>
- Saleh, C., Ibad, S., Suryadi, & Suryono, A. (2022). Analysis of Public Services Innovation Smart Kampung Banyuwangi Model in The Perspective of Public Service Management. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 57(1), 523–541. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.1.48>
- Sanjaya, A., Alunaza, H., Hidayah, T., & Biyoga, S. (2018). *Mass Media and Green Airport in Indonesia: Do They Aware of Smart Village?* 9–10.
- Sekarsari, R. W., & Winarno, T. (2018). Smart Kampung Sebagai Wujud Kemajuan Sistem Administrasi Dan Manajemen Di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(2), 82. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n2.p82-87>
- Setiawan P, T., Octawirani, P., & Perdana W, I. (2016). Kajian Model Akselerasi Pelayanan Desa Terintegrasi Melalui Program Smart Kampung Di Kabupaten Banyuwangi. *Pemberdayaan Dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Desa*, 115.
- Subekti, T., & Damayanti, R. (2019). Penerapan Model Smart Village dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(1), 18. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i1.1358>
- Sugiharti, I., Adnan, F., Prasetyo, B., & Shahihah, D. (2021). E-Government Roadmap

for Smart Governance: A Study from Banyuwangi Smart Village. *2021 International Conference on Computer Science, Information Technology, and Electrical Engineering, ICOMITEE 2021*, 105–112.
<https://doi.org/10.1109/ICOMITEE53461.2021.9650320>

Wargadinata, E. L. (2021). Hubungan dan Peran Pemangku Kepentingan Pogram Smart-Kampung Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 1(1), 47–64. <https://doi.org/https://10.33701/jiwbp.v1i1i.1449>